

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Ketimpangan.

Inti permasalahan yang seharusnya diselesaikan dalam pembangunan merupakan penghapusan kemiskinan serta perkembangan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Ketimpangan atau ketidakmerataan terjadi karena adanya perbedaan potensi, perbedaan demografis, ketenagakerjaan, dan perbedaan kondisi sosial antar wilayah, ini merupakan penyebab utama dalam ketimpangan terutama pada negara yang sedang berkembang. Selain itu kurangnya mobilitas barang maupun jasa akan ikut mendorong terjadinya ketimpangan antar daerah (Sjafrizal, 2016).

Ketimpangan dalam bidang ekonomi antar wilayah yang besar mengakibatkan dampak negatif dari segi ekonomi, sosial, bahkan segi politik. Ketimpangan dalam bidang ekonomi antar wilayah akan menyebabkan kurang efisiennya penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan (Sjafrizal, 2016).

Distribusi pendapatan adalah salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Pemerataan distribusi adalah salah satu kondisi penting untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dianggap baik ditandai dengan kondisi perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu menonjol dalam suatu perekonomian.

Secara teoritis, ketimpangan pendapatan antar dua orang atau dua kelompok dipengaruhi oleh berbagai perbedaan dalam banyak hal, perbedaan yang sering ditemui adalah dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan, gaji/upah yang diterima antar individu, subsidi yang didapat seperti akses untuk pendidikan, kesehatan, informasi, dan teknologi. Selain itu hal yang menjadi pendukung munculnya ketimpangan yaitu praktik-praktik diskriminasi seperti gender, umur, suku, dan agama. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan juga bisa disebabkan karena kesenjangan ekonomi dalam perbedaan tingkat pembangunan atau pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Hipotesisnya jika di suatu daerah tingkat pembangunan ekonominya pesat maka akan semakin terbuka juga kesempatan kerja yang ditawarkan dibandingkan dengan daerah yang pembangunan ekonominya stagnan (Tambunan, 2018).

Menurut Tambunan (2018) ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan pola distribusi pendapatan atau ketimpangan pendapatan antara di Kota dan di Desa, seperti halnya di Indonesia antara lain:

- 1) Arus penduduk atau tenaga kerja dari perdesaan ke perkotaan. Pindahnya orang dari perdesaan ke perkotaan memberi dampak positif pada perekonomian di pedesaan seperti halnya dalam kesempatan kerja produktif, tingkat produktivitas dan pendapatan rata-rata masyarakat yang meningkat. Berbeda halnya dengan di perkotaan pada suatu saat akan terjadi keadaan dimana tidak mampu menampung tenaga kerja yang meningkat tiap tahunnya karena sebagian besar pekerja datang dari

perdesaan, yang pada akhirnya meningkatkan pengangguran di satu pihak, dan menurunkan laju pertumbuhan tingkat upah di pihak lainnya.

2) Struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda antara perdesaan dan perkotaan. Jumlah sektor yang dihasilkan di perdesaan relatif lebih kecil daripada di perkotaan. Perbedaan selanjutnya terlihat dari tingkat pendapatan perkapita antara di perdesaan dan di perkotaan dimana pendapatan di perdesaan cenderung lebih kecil daripada di perkotaan sehingga mempengaruhi struktur pasar yang terjadi, struktur pasar di perdesaan cenderung lebih sederhana. Struktur pasar yang sederhana menimbulkan distorsi pasar yang kecil yang artinya kesempatan berusaha bagi individu lebih besar.

3) Dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional. Semakin banyak kegiatan ekonomi di perdesaan selain sektor pertanian, seperti industri manufaktur dalam skala yang kecil, industri rumah tangga, dan perdagangan. Diversifikasi ekonomi di perdesaan seperti di atas tentu menambah jumlah kesempatan kerja dan juga menambah pendapatan. Tingkat produktivitas serta tingkat pendapatan riil tenaga kerja di sektor pertanian meningkat diakibatkan pemakaian teknologi baru dan input-input yang lebih baik tentu akan meningkatkan pasar domestik maupun ekspor terhadap komoditas yang meningkat.

a. Pengukuran Ketimpangan.

Secara umum menurut Hudiyanto (2017) ukuran dari ketimpangan pendapatan pertama dihitung dengan cara menghitung berapa persen

pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk paling miskin. Langkah kedua dari ukuran ketimpangan yaitu bisa dengan cara membandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang miskin dengan 20 persen persentase yang diterima orang paling kaya. Kriteria ketimpangan yang diterapkan oleh Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- a) Tingkat ketimpangan ringan (*low inequality*) yaitu apabila 40 persen penduduk yang paling miskin menerima diatas 17 persen dari hasil pendapatan nasional.
- b) Tingkat ketimpangan berat (*highly inequality*) yaitu terjadi apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen dari jumlah pendapatan nasional.
- c) Tingkat ketimpangan sedang (*moderate inequality*) terjadi apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima sekitar 12 sampai 14 persen dari total pendapatan nasional.

Indikator untuk mengetahui ketimpangan pendapatan dan kesenjangan pendapatan dapat dilakukan dengan berbagai pengukuran yang secara umum sering digunakan untuk berbagai penelitian maupun pengetahuan, pengukuran tersebut diantaranya:

(1) Indeks Williamson.

Indeks Williamsom merupakan salah satu ukuran ketimpangan ekonomi antar Wilayah dan sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang biasanya digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Data dasar yang dipakai dalam

Indek Williamson merupakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dengan alasan yang dibandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah bukan tingkat kemakmuran antar kelompok (Sjafrizal, 2016). Berikut adalah perhitungan dari Indek Williamson:

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 (f_i/n)}{y}}$$

Keterangan:

$$0 < V_w < 1$$

y_i : PDRB per kapita daerah i

y : PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i : Jumlah penduduk daerah I

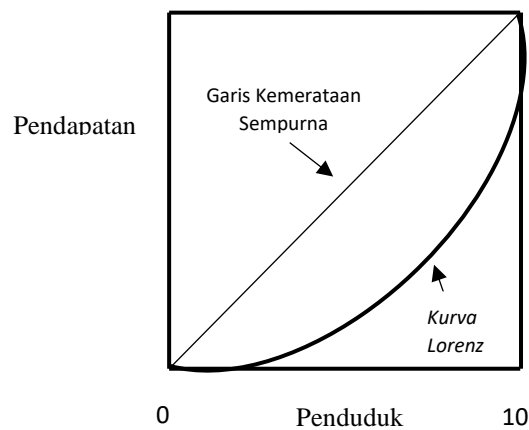
n : Jumlah Penduduk seluruh daerah

(2) Kurva Lorenz.

Kurva *Lorenz* merupakan salah satu ukuran untuk ketimpangan. Kurva *Lorenz* merupakan kurva yang dibuat berdasarkan angka angka ketimpangan dan ditampilkan dalam bentuk kurva. Kurva *Lorenz* diperkenalkan oleh ahli statistik dari Amerika Serikat yang bernama Conrad Lorenz.

Kurva *Lorenz* menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang diterima. Semakin jauh kurva *Lorenz* dari garis diagonal (kemerataan sempurna) maka semakin tinggi derajat ketidakmerataan. Ketika keadaan yang ekstrim dari ketidakmerataan sempurna terjadi dimana pendapatan hanya diterima oleh satu orang saja, dan akan ditunjukkan oleh berimpitnya kurva *Lorenz* tersebut dengan sumbu

horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan, atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat ketidakmerataan, kurva *Lorenz* akan semakin cembung dan semakin dekat dengan sumbu horizontal bagian bawah (Arsyad, 1999).



Sumber: Ekonomi Pembangunan (Hudiyanto)

GAMBAR 2.1.
Kurva Lorenz

(3) Indek Gini.

Indek gini merupakan metode untuk mengukur distribusi pendapatan antar golongan masyarakat kaya dan miskin dilakukan dengan menggunakan angka koefisien gini (Gini Ratio). Metode ditemukan pada tahun 1908 oleh ahli statistik Italia bernama Corrado Gini. Angka koefisien gini dapat dihitung sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i=1})$$

Keterangan:

P : Persentase rumah tangga atau penduduk i

Q_i : Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai ke-i

Nilai dari gini ratio adalah berkisar antara 0 sampai 1. Adapun kriteria yang digunakan secara umum untuk menentukan apakah nilai gini ratio (ketimpangan pendapatan) masih dalam ambang batas wajar atau sudah dalam batas yang tidak wajar. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (a) Tingkat ketimpangan dianggap ringan apabila indek gini berkisar 0.20 – 0.35.
- (b) Tingkat ketimpangan dianggap sedang apabila indeks gini berkisar antara 0.35 – 0.50.
- (c) Tingkat ketimpangan dianggap berat apabila indeks gini sebesar 0.5 – 0.70.

Menurut Sjafrizal (2016) Angka gini rasio lazimnya bervariasi, tergantung bagaimana tingkat pembangunan suatu negara. Fakta yang terjadi pada negara berkembang gini rasio tinggi, berbanding terbalik dengan negara kaya yang cenderung nilai rasio nya rendah. Akan tetapi gini ratio pada suatu daerah cenderung bervariasi, daerah perkotaan akan memiliki nilai gini ratio yang cenderung tinggi disebabkan lapangan pekerjaan di kota lebih bervariasi dibandingkan dengan daerah pedesaan yang didominasi oleh pekerjaan bidang pertanian.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau sering disebut juga Human Development Index (HDI) memaparkan bagaimana penduduk mengakses hasil pembangunan dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia juga indikator perhitungan penting untuk mengukur dalam sebuah keberhasilan untuk upaya membangun kualitas hidup manusia dan juga level bagi pembangunan suatu wilayah ataupun Negara.

Indek Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme (UNDP)* ditahun 1990 dan dipublikasikan secara bertahap di dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. Tiga dasar yang menjadi dimensi dalam Indek Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Umur panjang dan hidup sehat, digambarkan oleh angka harapan hidup saat lahir (AHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, asumsi yang digunakan bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.
- b. Pengetahuan, didasarkan atas angka pada rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalankan pendidikan formal, serta harapan lama sekolah (HLS) formal dari umur tertentu dimasa yang akan datang.
- c. Standar hidup yang layak, digambarkan melalui pengeluaran perkapita.

Adapun cara perhitungan dari Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Hasil perhitungan berkisar antara 10-100 yang artinya jika angka IPM kecil berarti kualitas sumber daya manusia yang masih rendah begitu pula sebaliknya jika nilai IPM lebih tinggi maka kualitas sumber daya manusia yang relatif tinggi.

Sumber daya manusia merupakan suatu yang paling penting dalam sebuah pertumbuhan ekonomi. Selain itu manusia merupakan salah satu aset bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus berfokus pada manusia. Kinerja dalam perekonomian secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan manusia seperti dalam hal tingkat pendapatan, serta distribusi pendapatan dalam masyarakat. Pembangunan Manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan akan mempengaruhi kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, bahkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik akan berpengaruh lebih baik lagi.

Berdasarkan penelitian Tri Hartini (2017) menyatakan bahwan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan yang artinya naik atau turunnya nilai Indek Pembangunan Manusia berpengaruh pada ketimpangan.

2. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Pasar tenaga kerja yang ideal bisa dicapai dengan upah yang dibayarkan untuk pekerja harus disesuaikan dengan menyeimbangkan antara jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan jumlah tenaga kerja yang diminta.

Penyesuaian seperti ini dilakukan untuk memastikan agar selalu memiliki pekerjaan. Hal diatas merupakan suatu kondisi pasar tenaga kerja yang ideal, tetapi nyatanya tidak dalam keadaan yang ideal, karena masih banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan, dengan kata lain tingkat pengangguran tidak dalam angka nol.

Menurut Prawoto (2019) pengangguran merupakan masalah lain dalam perekonomian selain masalah pertumbuhan ekonomi rendah, tingkat inflasi tinggi, ketidakseimbangan neraca pembayaran dan lainnya. Hampir semua Negara mempunyai masalah dalam tingkat pengangguran yang sudah menjadi masalah lama. Negara yang mempunyai tingkat pengangguran dibawah 4% dikatakan pada keadaan keseimbangan penuh (*full employment*).

Berdasarkan pengertian pengangguran serta dilihat dari akibat penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

a. Pengangguran Konjungtur.

Pengangguran konjungtur disebabkan karena adanya gelombang konjungtur, yaitu gelombang dimana adanya perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi, jika terjadi perubahan tingkat ekonomi yang meningkat maka tingkat pengangguran menjadi rendah, begitu pula sebaliknya jika tingkat kegiatan ekonomi mengalami kemunduran maka tingkat pengangguran meningkat.

b. Pengangguran Struktural.

Pengangguran struktural terjadi karena terdapat struktur ekonomi yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut menyebabkan perlunya ada

perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, tenaga kerja tidak bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam keterampilan baru tersebut. Tiga dasar yang memengaruhi pengangguran struktural yaitu: mobilitas tenaga kerja, kecepatan perubahan struktural serta aspek regional dari adanya struktural yang berubah.

c. Pengangguran Friksional.

Pengangguran friksional terjadi akibat adanya kesulitan penyesuaian dalam mencari pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang tersedia. Penyesuaian yang dianggap sulit tidak hanya tentang waktu yang dibutuhkan namun juga prosedur pelamaran dan seleksi, karena faktor jarak atau sedikitnya mendapatkan informasi. Selain itu, jenis pengangguran friksional dapat terjadi karena kurangnya fasilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru berada di lokasi yang tidak sesuai dengan pencari pekerjaan, dan juga terjadi akibat tidak mengetahui letak dimana lowongan pekerjaannya dan perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan juga tidak mengetahui keberadaan dari para pencari kerja dan perusahaan yang tidak mengetahui para pencari kerja yang sesuai dengan kemampuannya. Pengangguran friksional juga bisa terjadi karena pencari kerja yang masih mencari dan menginginkan pekerjaan yang lebih layak.

Model pengangguran yang sering terdapat dan dijumpai di negara berkembang, antara lain pengangguran:

1) Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*).

Pengangguran musiman disebabkan akibat adanya perubahan musim. Pengangguran ini biasanya sering terjadi pada sektor pertanian, karena perubahan musim yang terjadi.

2) Pengangguran Setengah Menganggur (*Under Unemployment*).

Pengangguran setengah menganggur terjadi saat pekerja hanya bekerja tidak lebih dari 35 jam perminggu dan bukan dalam kesehariannya. Pengangguran tersebut sering terjadi pada Negara miskin berkembang dikarenakan sebagian besar pendudukannya berpendidikan rendah, sehingga lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan tenaga kerja. Pengangguran setengah menganggur dibagi menjadi dua kelompok:

- a) Setengah pengangguran sukarela, untuk para pekerja dengan jam kerja dibawah jam normal tetapi tidak mencari pekerjaan maupun menerima pekerjaan lain yang upahnya lebih tinggi. Indikator setengah pengangguran dapat dihitung dengan cara:

$$= \frac{\sum \text{pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$$

- b) Setengah penganggur terpaksa, untuk para pekerja dengan jam kerja dibawah jam kerja secara normal dan masih mencari pekerjaan atau masih menerima pekerjaan lainnya.

3) Pengangguran tersembunyi (*Disguised Unemployment*).

Pengangguran tersembunyi terjadi akibat dari perekonomian yang kelebihan suplay tenaga kerja, sehingga menyebabkan pengangguran

tidak kentara. Tenaga kerja seperti ini ketika dialihkan dari suatu sektor tidak mengurangi produksi, jadi standar upah dibawah standar normal. Selain itu, walupun upah mereka dibawah standar dan tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar.

4) Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar belum tertampung di dalam sektor ekonomi. Pengangguran terbuka ini merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (yang belum pernah bekerja sama sekali, maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan usaha, mereka yang sedang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang memiliki pekerjaan tetapi belum memulainya. Indikator dalam pengangguran terbuka yaitu dengan membandingkan antara jumlah penduduk dengan usia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, dengan jumlah penduduk dalam angkatan kerja.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\sum \text{orang yang mencari kerja}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$$

Secara umum pengukuran pada tingkat pengangguran ditentukan oleh dua unsur utama yaitu:

- a. Jumlah pencari kerja, jumlah ini dapat diketahui dari selisih antara jumlah penduduk umur pencari kerja dengan jumlah penduduk bukan termasuk angkatan kerja seperti anak sekolah, mahasiswa dan ibu rumah tangga.

b. Kemampuan penyediaan atau penyerapan tenaga kerja yang terdapat pada suatu daerah. Perhitungan yang dipakai adalah dengan menggunakan konsep elastisitas kesempatan kerja (*Employment Elasticity*).

Pada dasarnya perhitungan jumlah pengangguran akan diketahui dengan mengurangi perkiraan jumlah penyediaan tenaga kerja dengan jumlah pencari pekerjaan. Jika nilai dari perhitungan bernilai positif maka jumlah pengangguran akan menurun, begitu pula sebaliknya jika bernilai negatif maka jumlah pengangguran akan bertambah (Sjafrizal, 2016).

Kehilangan pekerjaan atau sebagai pengangguran adalah masalah yang secara langsung berpengaruh pada manusia dan menjadi sebuah peristiwa ekonomi dan menjadi sebuah ukuran dalam tingkat kesejahteraan masyarakat yang sulit untuk dihadapi dalam kehidupan manusia. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan akan menurunkan standar hidup masa kini dan kekhawatiran untuk masa depan, maka dengan adanya pengangguran berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang akan berkurang (Mankiw, 2018).

Berdasarkan penelitian Onafowora and Owoye (2017) mendapatkan hasil bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif yang artinya naiknya nilai tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh dalam meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan.

3. Hubungan Penanaman Modal Asing terhadap ketimpangan Pendapatan.

Kemandirian adalah syarat dari sebuah negara untuk pembangunan. Kemandirian kadang dibuktikan dengan seberapa jauh negara membiayai

pembangunan secara mandiri. Pembangunan merupakan kegiatan yang dipelopori baik oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk dunia bisnis maupun yang lainnya. Hal diatas merupakan salah satu alasan negara berkembang masih memerlukan bantuan atau sumber pembiayaan dari luar negeri.

Hudiyanto (2017) , kebutuhan akan bantuan atau sumber pembiayaan luar negeri bisa berupa penanaman modal asing maupun utang luar negeri. Namun, dasar yang menimbulkan masalah tersebut atau disebut dua jurang (*two gap problem*) antara lain sebagai berikut:

- a. Jurang saving (*Saving Gap*), yaitu dimana negara berkembang dengan pendapatan yang rendah menyebabkan saving masyarakat yang juga rendah. Sementara pihak lain menganggap rendahnya kehidupan mengaruskan terjadinya pembangunan berupa investasi yang besar-besaran. Oleh sebab itu timbulnya gap antara tersediannya tabungan dengan kebutuhan untuk investasi. Oleh karena itu pembiayaan dari luar negeri dianggap sangat perlu.
- b. Jurang Devisa (*Foreign Exchange Gap*), suatu kebutuhan devisa untuk mengimpor berbagai jenis barang modal dalam menggerakkan industri yang bedasr di dalam negeri yang sedang berkembang dengan kecilnya devisa yang tersedia. Dengan demikian, untuk menutupi kebutuhan tersebut sumber pembiayaan dari luar sangat diperlukan.

Investasi asing dibagi menjadi dua yaitu penanaman modal asing secara langsung atau PMA (*Foreign Direct Investment*) dan investasi asing tidak

langsung. Penanaman modal asing secara langsung merupakan aliran dana dari perusahaan asing atau perusahaan luar negeri kepada perusahaan di negara lain. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

- 1) Pembelian asset dalam negeri oleh orang atau sebuah perusahaan dari luar negeri. Investasi ini biasanya lebih cepat masuk secara operasional dengan mengandalkan jaringan lokal yang telah ada.
- 2) Investasi baru, perusahaan asing masuk sebagai usaha yang baru.
- 3) Kerjasama internasional, bentuk kerjasama bisa berupa perihal kepemilikan bersama atau dalam bentuk kerjasama operasional
- 4) Merger dan akuisisi (*acquisition*), yaitu perusahaan asing yang masuk ke dalam perusahaan dalam negeri dan membentuk usaha yang lebih besar (*merger*) atau menggabungkan perusahaan lain ke dalam perusahaannya (*akuisisi*) dan kemudian dikontrol oleh perusahaan asing.

Peran modal asing dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di jelaskan dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing dalam pasal 1 yaitu:

Pengertian penanaman modal asing dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung mengandung risiko dari penanaman modal tersebut.

Kritik mengenai masuknya investasi asing ke dalam suatu negara agaknya sangat lumrah terjadi diberbagai negara. Dibawah ini beberapa kritik menurut Hudiyanto (2017) sebagai berikut :

- 1) Dampak balik terhadap neraca pembayaran. Investasi asing yang datang membawa devisa di negara untuk membantu mengatasi kesulitan di dalam negara tersebut. Dalam jangka panjang PMA akan terjadi gerakan balik devisa, yaitu:
 - a) *Repatriasi*, yaitu upaya dari para PMA membawa devisa yang dihasilkan dari hasil keuntungannya untuk diinvestasikan di negara asal dari PMA tersebut. Jadi keuntungan berupa devisa hanya terjadi pada tahun-tahun pertama saja.
 - b) Impor barang untuk mendukung beroperasinya investasi asing. Bahwasannya datangnya PMA ke dalam suatu negara justru mendorong kegiatan impor seperti bahan baku, mesin dan juga tenaga ahli dari negara asal investor yang dibutuhkan oleh PMA.
- 2) Dualisme ekonomi, hadirnya investasi asing umumnya akan memberikan upah kepada pekerja yang tinggi, namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan dimana upah yang diterima oleh pekerja jika mereka bekerja pada perusahaan domestik, mereka akan menerima upah lebih rendah dari pada bekerja pada perusahaan asing. Situasi dualistik akan terasa dampaknya jika pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum regional yang ditunjukkan pada perusahaan asing. Kebijakan yang baik akan berdampak buruk pada perusahaan domestik yang tidak mampu membayar upah pekerja sesuai dengan kebijakan UMR.
- 3) Perusahaan penanam modal asing melakukan kecurangan yang merugikan keuangan negara dalam praktek *transfer pricing*. *Transfer Pricing*

merupakan praktek dalam menghindari pajak keuntungan yang seharusnya dibayar oleh perusahaan penanam modal asing kepada negara yang ditempatinya, praktek curang ini bisa berupa berdagang dengan perusahaan sendiri (*insider trading*).

- 4) Ancaman bagi kedaulatan bangsa, karena akan membuat kecenderungan bangsa pada pihak asing.

Hudiyanto (2017) Kontroversi dari beberapa pihak sering terjadi karena hadirnya perusahaan asing negara, walaupun kontroversi mewarnai adanya investor asing datang tetapi ada hal positif yang ditimbulkan adanya investasi asing, antara lain:

- 1) Kehadiran modal asing memberi dampak langsung contohnya pada pengurangan tekanan dalam neraca pembayaran.
- 2) Modal asing disertai dengan masuknya sumberdaya baik berupa sumber daya kapital, mesin, dan teknologi yang berkualitas. Teknologi yang dibawa oleh investor asing secara tidak langsung akan berdampak positif kepada pekerja dalam negeri misalnya dalam hal pengoperasian mesin dan teknologi yang canggih.
- 3) Modal asing yang masuk bisa menciptakan pekerjaan bagi masyarakat ditempat mereka menempatkan investasinya.

Investasi pada dasarnya adalah kegiatan pembangunan ekonomi yang bisa dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat meningkatkan standar hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Tri Hartini (2017) bahwa investasi yang termasuk di dalamnya Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan artinya turunnya nilai investasi maka akan berpengaruh dalam menurunkan ketimpangan.

4. Hubungan Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan pusat ataupun pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah yang tujuannya untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam sistem pelayanan publik yang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab birokrasi di Indonesia (Fahmi, 2018).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang desentralisasi fiskal dan menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang pengelolaan pengeluaran keuangan yang lebih besar sesuai potensi dan kebutuhan daerah.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan bahwa pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembagian wewenang ini didasarkan pada pemikiran yang menyebutkan bahwa selalu terdapat bagian urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Urusan yang menyangkut hal-hal terjaminnya kelangsungan hidup Negara secara keseluruhan. Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah tidak dapat di hindari karena pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan itu sendiri dan pembangunan di daerah (Sigit Pudjianto, 2019).

Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan akan tercipta kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui analisis rasio. Derajat desentralisasi fiskal dapat diukur dengan menghitung (Tangkilisan, 2005) :

- a. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD).
- b. Rasio sumbangan dan bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Rasio Total Penerimaan Daerah terhadap total penerimaan negara.

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Ketimpangan pendapatan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan fiskal seperti perpajakan dan subsidi, kebijakan moneter atau perbankan, dan kebijakan lainnya (Tambunan, 2018).

Mekanisme hubungan keuangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah diharapkan membantu perekonomian daerah tersebut menjadi lebih baik, karena pada dasarnya yang mengetahui kebutuhan suatu daerah hanyalah daerah tersebut.

Ketika ada pengaruh antara derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai koefisien yang positif maka

menunjukkan semakin besar pengeluaran pemerintah maka artinya semakin meningkat pula kesenjangan pendapatan. Pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam belanja publik seharusnya menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka ketimpangan pendapatan justru belum mampu menjangkau dan dinikmati masyarakat secara langsung. Meningkatnya ketimpangan pendapatan saat berlakunya derajat desentralisasi fiskal bisa disebabkan karena alokasi anggaran yang kurang tepat (Thofan, 2019).

C. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang dapat menjadi rujukan yang relevan dan menjadi referensi dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Hartin (2017) dengan judul “Pengaruh PDRB perkapita, Investasi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015” dimana peneliti ini menggunakan *Indeks Williamson* untuk variabel dependennya, dan untuk variabel independen peneliti menggunakan data PDRB perkapita, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitiannya yaitu analisis data panel dengan menggunakan metode *fixed effect model*.

Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan yang artinya PDRB perkapita dengan hasil positif mampu mengurangi tingkat ketimpangan di DIY. Selain itu hasil lain

dari variabel independen dalam penelitian yaitu variabel investasi dan IPM sama-sama berpengaruh negatif dan signifikan.

2. Penelitian yang dilakukan Rosa dan Sovita (2016) dalam judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa”. Dalam penelitian ini faktor yang dijadikan penelitian yaitu PDRB, jumlah penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Derajat desentralisasi fiskal dengan variabel dependennya indek gini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu regresi data panel.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel PDBR, jumlah penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Sedangkan variabel derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anshari, Azhar dan Ariusi (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia”, dengan alat analisis berupa regresi data panel dan menggunakan variabel independennya yaitu variabel pendidikan, Upah minimum Provinsi dan belanja modal dengan variabel dependennya Indeks Gini.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut bahwa semua variabel independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh Provinsi di Indonesia.

4. Penelitian Muhammad Arif dan Wicaksani (2017) dengan judul yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan yaitu “Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya” dengan variabel yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi data panel dengan metode *Random Effect Model*.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian tersebut yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi serta tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan, dan pada variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewa dan Budiana (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Secara Langsung maupun Tidak Langsung Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Gini ratio sebagai variabel dependen, dan ekspor, penanaman modal asing, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dengan data yang digunakan merupakan data sekunder dari tahun 2007-2013. Alat analisis yang digunakan merupakan regresi data panel.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa variabel ekspor dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali, sedangkan variabel penanaman modal asing

tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali.

6. Thofan (2019) membahas tentang beberapa pengaruh ketimpangan pendapatan yang berjudul “Analisis Pengaruh Perumbuhan Ekonomi, IPM, dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017), menggunakan alat analisis data panel dengan *fixed effect model*.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur, sedangkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017.

7. Shahbaz, Logan, Tiwari dan Jahromi (2015) melakukan penelitian mengenai ketimpangan pendapatan dengan judul “*Income Inequality: Is There Any Financial Kuznets Iran?*” dimana variabel yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan keuangan, inflasi dan globalisasi, model yang digunakan dalam analisis yaitu VECM.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif, variabel pengembangan keuangan berpengaruh negative dan variabel inflasi tidak berpengaruh ketimpangan pendapatan.

8. Penelitian Suanes (2016) dengan judul “*Foreign Direct Investment and Inequality in Latin America: a Sectoral Analysis*”. Dengan menggunakan

model regresi data panel, penelitian ini menggunakan variabel investasi asing, populasi, pengeluaran pemerintah dan modal manusia.

Hasil dari penelitian tersebut pada variabel investasi asing, populasi, pengeluaran pemerintah dan modal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

9. Penelitian yang dilakukan Onafowora dan Owoye pada tahun (2015) yang berjudul “*A Panel Vector Auto Regression Analysis of Income Inequality Dynamics in Each of 50 States of USA*” dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode VAR. Data yang digunakan merupakan data kebebasan ekonomi, pendidikan, populasi serta pengangguran.

Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu kebebasan ekonomi, populasi dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan.

10. Penelitian yang berjudul “*The Kuznets Curve and The Great U-Turn: Income Inequality in U.S. Counties, 1970 To 1990*” yang dilakukan oleh Nelsen, dan Alderson (2015). Alat analisis yang digunakan merupakan model regresi panel data dengan menggunakan variabel dependennya ketimpangan distribusi pendapatan serta variabel independennya yaitu partisipasi angkatan kerja wanita, rumah tangga yang dikepalai wanita, populasi yang berusia diatas 65 tahun, angkatan kerja manufaktur dan tingkat pengangguran.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa partisipasi angkatan kerja wanita berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di U.S. Sedangkan variabel lain seperti rumah tangga yang dikepalai wanita, populasi

yang berusia diatas 65 tahun, angkatan kerja manufaktur dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di U.S.

D. Hipotesis

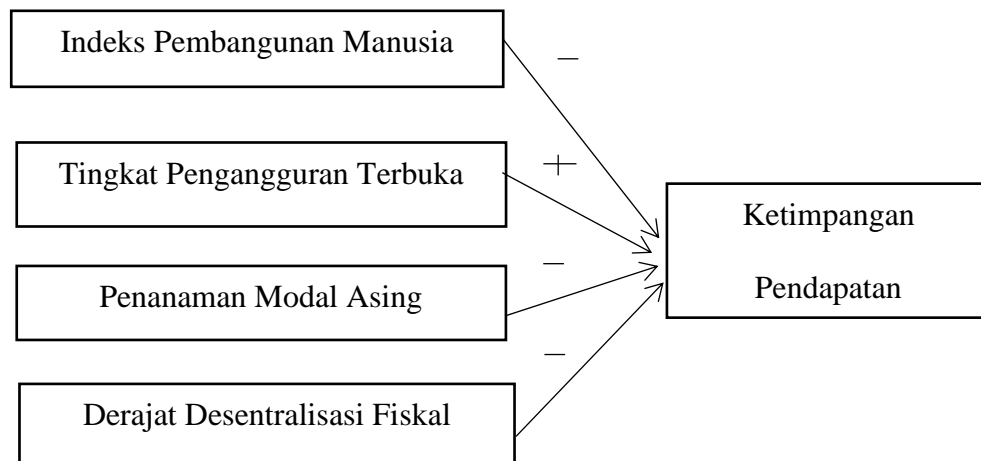
Dalam melakukan analisis maka terlebih dahulu ditentukan hipotesis yang digunakan. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang kebenarnya harus dikaji dan diuji secara empiris melalui penelitian dengan data-data yang terkumpul. Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018.
3. Penanaman Modal asing diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2012-2018.
4. Derajat desentralisasi fiskal diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2010-2018.

E. Model Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu mengenai hubungan antar variabel dependen dan variabel independen, dimana variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel IPM, TPT, PMA dan Derajat

desentralisasi fiskal terhadap variabel dependennya yaitu variabel ketimpangan pendapatan. Dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



GAMBAR 2.2.
Kerangka Pemikiran